

Pra SD
111.127

SD
912.023

SMP
578.465

SMA
424.145

Ponpes
10.681

SLB
4.548

Balita
7.811

Ibu Hamil
1.835

Ibu Menyusui
2.613

Anggaran
**RP 710,5
Miliar**

Jumlah
Dapur Umum
726 Unit

02 GOVERNMENTTODAY
Aturan Baru Per 21 April,
Menteri Ara: Itu Batas Maksimal

05 NUSANTARA
Bank Indonesia Bersikukuh
Kasus Uang Palsu Tidak Naik

10 LISTSTYLE
Inspirasi Kebaya Anggun untuk
Hari Kartini

PENERIMA
Target Awal
17.9 Juta Orang

Target Setelah Perluasan
82.9 Juta Orang

ANGGARAN
Target Awal
Rp 71 Triliun
Target Setelah Perluasan
Rp 171 Triliun

**RANCANGAN APBN
PROGRAM MBG**

Tahun Anggaran 2025
Rp 71 Triliun

Tahun Anggaran 2026
Rp 72.5 Triliun

Tahun Anggaran 2027
Rp 73.9 Triliun

Tahun Anggaran 2028
Rp 75.4 Triliun

Sumber : Badan Gizi Nasional RI

Diberitahukan kepada pembaca setia,
Jumat (18/4/2025) Koran Lentera Today
tidak terbit, Libur Nasional peringatan
Wafat Yesus Kristus. Terbit kembali pada
Senin (21/4/2025). Update berita bisa
terus diikuti melalui www.lentera.co dan
www.lenteratoday.com.

TAK DIBAYAR RP 1 MILIARAN DAPUR MITRA MBG TUTUP

BGN Tak Mau Disangkutkkan, Polisi Menyelidiki



Sejak awal diluncurkan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) banjir kritikan. Salah satunya mengenai lemahnya pengawasan yang potensi menciptakan peluang penyelewengan. Kekhawatiran tersebut pun jadi nyata saat Dapur Mitra MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, memutuskan berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025. Penyebabnya, tidak dibayarnya biaya operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) senilai hampir Rp 1 miliar. Ral hanya itu, nilai anggaran per porsi makanan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Dalam kontrak, disebutkan harga makanan adalah Rp15.000 per porsi untuk semua porsi makanan. Namun, di tengah pelaksanaan, sebagian harga diubah secara oleh yayasan MBN menjadi Rp13.000 per porsi. Tak hanya itu, dari kedua nilai tersebut, duit masih dipotong lagi sebesar Rp2.500 per porsi. Sehingga nilai aktual yang diterima dapur MBG Kalibata hanya Rp12.500, bahkan Rp10.500 per porsi. Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menerima laporan berjanji melakukan pengusutan. Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.Lah!

Gaduh Syarat Gaji Rp14 Juta untuk Beli Rumah Subsidi

Aturan Baru Per 21 April, Menteri Ara: Itu Batas Maksimal

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengatakan syarat gaji Rp14 juta adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal. Dikatakan, hanya boleh dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah akan mengumumkan aturan baru untuk kepemilikan rumah subsidi pada 21 April mendatang. Aturan yang akan berubah pada aturan baru rumah subsidi ini adalah syarat batas penghasilan maksimal untuk masyarakat yang berhak membeli rumah subsidi.

Saat ini batas penghasilan maksimal rumah subsidi diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020, dimana bagi MBR yang lajang batas maksimalnya Rp 7 juta per bulan dan Rp 13 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pada aturan baru rumah subsidi batas penghasilan MBR akan diubah. Perubahannya menjadi berpenghasilan maksimal Rp 14 juta per bulan bagi yang berkeluarga dan Rp 12 juta per bulan bagi yang lajang.

"Batas penghasilan. Jadi yang kalian pahami itu orang yang berpenghasilan Rp 14 juta baru beli rumah MBR, atau sampai Rp 14 juta boleh? Sampai 14 juta kan. Berarti kebijakan saya pro rakyat atau tidak? Pro rakyat," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

"Khusus buat MBR nanti minggu depan, sekitar tanggal 21-22 (April) saya akan umumkan ukuran siapa yang bisa dapat rumah subsidi," ujarnya

Aturan baru rumah subsidi ini akan dituangkan dalam bentuk Kepmen yang diperkirakan terbit 21 April mendatang. Saat ini Kementerian PKP bersama pihak terkait masih melakukan pembahasan teknis.

Sasar Pekerja Informal

Menurut Ara, kebutuhan rumah layak tidak hanya milik mereka yang memiliki slip gaji tetap. Banyak kepala keluarga yang memiliki penghasilan stabil, namun berasal dari sektor informal, seperti pedagang kaki lima, sopir ojek, atau tukang bangunan. Mereka kerap tertinggal karena sistem pembiayaan yang mengandalkan potongan gaji tetap sebagai jaminan.

"Pada waktu itu kan saya janji, minggu depan saya umumkan. Kita terbuka. Kalau gaji Rp 7 juta punya istri satu, anak dua, mau berapa nih? Kita tingkatkan dong, supaya kesempatan dapat rumah MBR makin banyak," ungkapnya.

Ia menyebut, perluasan batas penghasilan hanya satu bagian dari strategi besar yang sedang disusun. Pemerintah juga tengah merancang mekanisme khusus agar wong cilik, kelompok masyarakat kecil yang tidak memiliki slip gaji, bisa tetap mengakses KPR bersubsidi. Mereka termasuk para tukang bakso, pedagang ayam, penjual sayur, buruh harian, dan pelaku usaha mikro lainnya.

"Nanti akan tambah lagi, saya akan pikirkan tambahan-tambahan lagi 'Wong Cilik', tapi saya lagi matangkan. Intinya informal, karena presiden luar biasa, karena kita harus juga berikan banyak kepada sektor informal kita yang non gaji," ujar Ara.

Ia menyadari, kelompok ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi sektor perbankan, karena tidak



Aktivitas pekerja pada proyek perumahan subsidi di Desa Selacau, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. (Dok)

adanya penghasilan tetap yang bisa dijadikan dasar potongan kredit. Namun justru di sinilah, menurutnya, negara harus hadir. Sistem perbankan memang lebih nyaman melayani pegawai negeri, TNI, atau pegawai BUMN yang gajinya bisa langsung dipotong tiap bulan.

"Karena apa? Karena mereka harus diberikan keadilan. Bagi bank itu lebih sulit, karena motong gaji jauh lebih mudah, lebih gampang motong gaji tentara, pegawai negeri, pegawai BUMN, jauh lebih gampang. Tapi kalau bakso, ayam, tukang ayam, sayur, tapi mereka adalah rakyat kita. Mereka juga harus memberikan akses kepada perbankan walaupun lebih sulit, karena tidak punya slip gaji," kata Ara.

Langkah ini bukan tanpa risiko. Pemerintah dan sektor perbankan harus mencari sistem penjaminan baru, dan mungkin perlu menggandeng lembaga lain dalam pelaksanaannya. Namun bagi Ara, ini bukan soal mudah atau sulit, melainkan soal keberanian negara untuk menghadirkan keadilan sosial secara nyata.

Ia menegaskan, jika negara hanya memilih kebijakan yang mudah dilakukan, maka keadilan tidak akan pernah menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Ia meminta semua pihak, termasuk lembaga keuangan, ikut membuka hati dalam merancang sistem yang inklusif. (wid, rls, ist/dya)

Program Khusus Wartawan Ditolak 3 Organisasi Jurnalis

PEMERINTAH memberikan program rumah subsidi untuk wartawan. Tiga organisasi jurnalis menolak program tersebut karena khawatir jurnalis tidak kritis lagi. Tiga organisasi yang menolak program kredit perumahan wartawan itu adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewartu Foto Indonesia (PFI). Menurut mereka, tidak perlu segolongan profesi diistimewakan di atas profesi lainnya dalam program kredit perumahan ini.

Alih-alih mengistimewakan jurnalis lewat pemberian jalur khusus untuk mengakses perumahan, akan lebih baik bila pemerintah menjamin kelayakan upah minimum jurnalis. "Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya," kata Reno Esnir, Ketua Umum PFI, dilansir siaran pers yang dimuat di situs resmi AJI, dikutip Rabu (16/4/2025).

Sementara itu Ketua Umum AJI, Nany Afrida mengatakan, "Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-

teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank."

Jurnalis sebagai warga negara memang membutuhkan rumah. Namun tidak hanya jurnalis, melainkan semua warga negara apapun profesinya membutuhkan rumah. Karena itu persyaratan kredit rumah harus berlaku untuk semua warga negara tanpa harus membedakan profesinya. "Pemerintah mesti fokus bagaimana persyaratan kredit rumah terjangkau semua lapisan masyarakat," kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.

"IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik," kata dia.

Herik Kurniawan menyarankan Dewan Pers tidak perlu terlibat dalam program tersebut. Karena Dewan Pers mandatnya lebih fokus pada jurnalistik, sementara program rumah subsidi untuk jurnalis tidak terkait langsung dengan pers. "Tidak perlu ada campur tangan Dewan Pers. Karena bukan mandat Dewan Pers untuk mengurus perumahan," kata Herik Kurniawan.

Karena itu AJI, IJTI, dan PFI menolak rencana program pemerintah memberikan kredit rumah bersubsidi bagi jurnalis.

Sebaiknya para jurnalis memperoleh program kredit rumah bersubsidi lewat jalur normal, bersama-sama dengan warga negara yang lain. Akan lebih baik jika pemerintah fokus pada pengadaan rumah yang terjangkau oleh warga negara dan target 3 juta rumah benar terpenuhi.

Jika pemerintah mau memperbaiki kesejahteraan jurnalis, seharusnya memastikan perusahaan media menjalankan UU Tenaga Kerja. Jika jurnalis sejahtera maka kredit rumah dapat mereka akses. "Termasuk memastikan upah minimum jurnalis, memperbaiki ekosistem media dan menghormati kerja-kerja jurnalis," kata Nany Afrida.

Menanggapi hal ini, Menteri Prumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) tidak mempermasalahkan penolakan tersebut. Ia memastikan wartawan penerima rumah subsidi masih bisa mengkritik pemerintah.

"Nggak apa-apa, kita hanya berniat baik dan wartawan tetap kritis saja terhadap kami," ujar Ara. (ist, din rls/dya)

UU TNI Sudah di Meja Prabowo tapi Belum Diteken, Kenapa?

Presiden Prabowo Subianto diketahui belum meneken atau menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Padahal, RUU TNI sudah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna pada Kamis (20/3/2025). Kenapa?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan alasan Prabowo belum kunjung meneken atau menandatangani RUU TNI. Supratman mengatakan, ada banyak undang-undang yang akan ditandatangani Prabowo sehingga membutuhkan waktu.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Sekretariat Negara," kata Supratman, di kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, dikutip Rabu (16/4/2025).

Supratman mengatakan, revisi UU TNI secara otomatis berlaku meski belum ditandatangani presiden. Meski demikian, ia yakin Presiden Prabowo akan segera menandatangani revisi UU TNI. "Semua pasti prosesnya normal. Karena itu tinggal menunggu waktu, apalagi jadwal beliau kan kita tidak tahu," ujar dia.

Di samping itu, Supratman meminta masyarakat tidak khawatir

terkait dwifungsi TNI setelah RUU TNI berlaku. "Jadi seperti yang saya sampaikan, yang berubah itu kan hanya soal 2 penambahan tugas TNI di luar tugas pokoknya," ucap dia.

Dia pun menjawab kekhawatiran publik dengan memastikan bahwa Undang-Undang TNI yang disahkan nantinya oleh Prabowo Subianto Presiden RI tak akan berubah dari draf yang telah disetujui DPR. "Tidak mungkin. Saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah," kata Supratman.

Sebab, Rancangan UU TNI yang disetujui oleh parlemen hanya menambahkan penugasan prajurit di dua lembaga yang sebelumnya juga

sudah berhubungan dengan TNI.

"Yakni yang ada di Mahkamah Agung karena ada hakim militer dan ada Kamar Pidana Militernya, juga di Kejaksaan Agung yang kebetulan memang sudah sebelum Pak Presiden Prabowo juga Jaksa Agung Pidana Militer kan sudah ada. Dan itu memberi legitimasi terhadapnya," katanya.

Sebuah RUU haruslah ditandatangani oleh Presiden untuk diundangkan, agar undang-undang tersebut dapat berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dijelaskan, Presiden harus menandatangani RUU yang sudah

disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya.

Artinya, Prabowo sebagai Presiden harus menandatangani RUU TNI yang sudah disahkan DPR sebelum 20 April 2025, terhitung setelah pengesahannya pada 20 Maret lalu. "Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden," bunyi Pasal 73 ayat (2) UU P3. (din, rls, ist, kum/dya)



Aksi Camping Bareng Warga di seberang Gerbang Pancasila DPR menolak UU TNI. (Dok)

Piknik Melawan UU TNI Berlanjut

PENDEMO mendirikan tenda lagi di seberang Gerbang Pancasila DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025). Para pendemo yang menggelar aksi damai tersebut sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah menjadi undang-undang. Sebelumnya tenda-tenda mereka sempat diusir oleh pihak berwenang.

Dosen hukum tata negara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Bivitri Susanti menilai aksi Piknik Melawan atau kemah di depan Gedung DPR tak berpengaruh secara langsung untuk mencabut revisi UU TNI. Namun, aksi tersebut efektif untuk membangun gerakan sosial yang lebih luas.

"Aksi sekecil ini dengan situasi demokrasi seperti sekarang, menurut saya enggak akan punya pengaruh. Terus terang ya, ini mereka (DPR dan pemerintah) mau demonstrasi ribuan orang juga bergeming kok," tutur Bivitri usai memberikan kuliah umum di trotoar seberang Gerbang Pancasila Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Dia menilai apa yang terjadi pada rangkaian unjuk rasa revisi UU

Pilkada 2024—yang disebut juga dengan aksi Peringatan Darurat—merupakan sebuah anomali. Keberhasilan aksi untuk membatalkan revisi UU Pilkada, menurut Bivitri, bukan karena massa.

Bila gerakan ini diukur dari keberhasilannya mengubah undang-undang, Bivitri menyatakan tak akan efektif. "Tapi, saya melihatnya gerakan ini bagus karena dengan situasi demokrasi yang seperti sekarang, kita memang butuh membangun gerakan sosial," ujar dia.

Gerakan sosial seperti aksi Piknik Melawan dianggapnya bukan lagi tentang produk perundang-undangan, tetapi lebih mengenai cara memberdayakan masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap negara.

"Gerakan ini supaya penyelenggara negara paham bahwa tugas mereka itu sebenarnya melayani kita sebagai warga. Jadi manfaatnya itu lebih ke perubahan relasi dan lebih banyak memperluas gerakan warga itu, bukan ke undang-undang itu sendiri," kata Bivitri.

Aksi Piknik Melawan digelar untuk menuntut pencabutan revisi UU TNI. Masyarakat yang hadir tidak terlibat aliansi tertentu. Banyak dari mereka datang karena melihat

ajakan di media sosial X @barengwarga. Sehingga, banyak pula yang baru bertemu dan berkenalan di lokasi aksi. Bivitri sendiri pun baru pertama kalinya datang dan mengaku tak mengenal peserta aksi lain sebelum kedatangannya itu.

Pada aksi berkemah ini, peserta mengisi waktu luang dengan mengadakan sejumlah kegiatan, seperti kelas Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo, kelas boxing, kuliah umum, pembacaan puisi, hingga mengadakan lapak baca.

Aksi Piknik Melawan sudah dua pekan berlangsung. Namun pada Rabu, 9 April 2025, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta membubarkan sejumlah warga yang melakukan aksi berkemah di gerbang Gedung MPR/DPR/DPD itu. Sebelum akhirnya dibubarkan, para peserta aksi telah berkemah di depan Gerbang Pancasila selama 82 jam.

Kemudian pada Senin pagi, 14 April 2025, sejumlah peserta memutuskan untuk kembali menggelar aksi piknik itu. Tenda sebelumnya hendak didirikan tepat di depan Gerbang Pancasila DPR RI, namun pesera dipaksa bergeser ke trotoar di seberangnya. Aksi piknik pun baru bisa dimulai siang harinya.

Pada Senin malam, 14 April 2025, kepolisian berupaya membubarkan aksi itu. Enam orang peserta piknik—yang terdiri dari dua perempuan dan empat laki-laki—dimasukkan ke dalam mobil polisi. Penangkapan disebut dilakukan tanpa proses interogasi dan tanpa pendampingan hukum.

Seorang perwakilan aksi yang meminta untuk dipanggil AI menceritakan setelah keenam orang itu dibebaskan, para peserta Piknik Melawan kembali mendirikan tenda mereka. Berdasarkan pantauan Tempo pada Selasa, 15 April 2025 pukul 09.55 WIB, dua tenda terpasang di trotoar. Pada kedua tenda tersebut terempel tulisan "Mohon maaf perjalanan Anda terganggu, sedang ada perbaikan demokrasi." (din, ist, rls/dya)

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) dijelaskan:

- Presiden harus menandatangani RUU yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rentang waktu 30 hari setelah pengesahannya. "Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden," bunyi Pasal 73 ayat (2) UU P3.
- "Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan," bunyi Pasal 73 ayat (3) UU P3.
- "Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," bunyi Pasal 73 ayat (4) UU 13/2022.

Total 7 Lokasi Digeledah KPK Terkait Dana Hibah Jatim

KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan pada 7 lokasi di Jawa Timur pada 14 hingga 16 April 2025. Penggeledahan ini terkait penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 14-16 April 2025 menggeledah tujuh lokasi terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan pada Senin (14/4/2025) lalu penyidik menggeledah 3 rumah. Salah satu rumah yang digeledah adalah milik anggota DPD RI, La Nyalla Mattalitti.

"Hari Senin, ada tiga lokasi di Kota Surabaya. Tiga lokasi adalah rumah pribadi. Salah satunya merupakan rumah yang tadi disebut Saudara LN (La Nyalla)," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (16/4/2024).

Sementara pada Selasa (15/4/2024), lanjut Tessa, penyidik menggeledah sebuah kantor. Diketahui, lokasi yang digeledah merupakan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur.

Kemudian hari ini, Rabu (16/4/2024) penyidik menggeledah 3 rumah lainnya. Namun belum dirinci rumah siapa saja.

"Dari tiga hari tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi, tidak spesifik disampaikan barang bukti elektronik dan dokumen tersebut disita dan di mana," ungkapnya.

Kasus Dana Hibah

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak. Sahat diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat. Dana hibah ini dinamai hibah pokok pikiran (pokir).

Terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi

masyarakat di Jatim.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021. Sahat yang merupakan politikus Golkar dan seorang pihak lain bernama Abdul Hamid diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023..

Sahat sudah menjalani proses sidang dan divonis 9 tahun penjara. Pengembangan kasusnya saat ini tengah diusut. Dalam pengembangan itu, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, tapi identitasnya belum diumumkan. Begitu juga konstruksi kasusnya.

Berdasarkan perannya, empat tersangka merupakan penerima. Tiga



Pengamanan saat rumah La Nyalla di Kota Surabaya, Jawa Timur, digeledah penyidik KPK pada Senin (14/4/2025). Ist

orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sementara, satu lainnya adalah staf dari penyelenggara negara.

Sementara, 17 tersangka sisanya berperan sebagai pemberi. Sebanyak 15 orang berasal dari pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Dalam kasus ini, KPK juga turut memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah Abdul Halim Iskandar. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDPTT), itu diperiksa di Jawa Timur pada Selasa (17/12/2024).

Teranyar, penyidik KPK juga memeriksa Anggota DPR RI Anwar

Sadat (AS) dan beberapa pihak swasta soal kepemilikan aset terkait kasus ini pada Kamis (9/1/2025). Dia diperiksa dalam kapasitasnya saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim. (wid, rls, kum/dya)

TENTANG LA NYALLA MATTALITTI

- Lahir di Jakarta, 10 Mei 1959.
- Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 1995-1998.
- Wakil Ketua KONI Provinsi Jawa Timur 2010-2019.
- Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur periode 2011-2012.
- Ketua Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia 2011-2013.
- Ketua Umum PSSI 2013-2015.
- Didakwa dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur pada 2016. Dia divonis bebas.
- Ketua DPD RI sejak 2019-2024

Daftar Kontroversi

- Menjadi tersangka kasus dana hibah Kadin Jatim
- Sempat melarikan diri ke Singapura
- Dibebaskan hakim di pengadilan Tipikor di kasus hibah Kadin
- Menjadi Ketua Umum PSSI Versi KPSI
- Berseteru dengan Partai Gerindra dan Prabowo soal pencalonannya di Pilkada Jatim



Wakil Ketua KPK: La Nyalla Kala Itu Pengurus KONI

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengkonfirmasi telah menggeledah rumah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024, La Nyalla Mattalitti di Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan perkara dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Jawa Timur periode 2019-2022.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa penyidikan tersebut terkait dengan jabatan La Nyalla kala itu, yakni Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Jawa Timur (Jatim) periode 2010-2019.

"Terkait dengan penyidikan perkara dana hibah, pada saat yang bersangkutan sebagai wakil ketua KONI," kata Fitroh kepada awak media, Rabu (16/4/2025).

Berdasarkan informasi yang didapat, penggeledahan tersebut juga dilakukan penyidik pada kantor

KONI Jatim. Meskipun begitu, KPK belum memberikan penjelasan lebih detil alasan KONI ikut terseret dalam kasus korupsi tersebut.

"Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan," ucap juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

Dia pun mengatakan, penyidik masih dalam proses menimbang soal potensi pemeriksaan terhadap La Nyalla. Jika dibutuhkan, kata dia, La Nyalla dapat diperiksa untuk mengklasifikasi barang yang disita dalam penggeledahan yang dilakukan di kediamannya.

"Kalau seandainya penyidik membutuhkan seseorang maupun subjek tertentu untuk diklarifikasi tentu akan dilakukan pemanggilan. Namun saya tidak bisa memastikan apakah saudara LN ini akan dipanggil atau tidak. Nanti kita tunggu saja," kata Tessa. (wid, rls, ist/dya)

Bank Indonesia Bersikukuh Kasus Uang Palsu Tidak Naik

perlu khawatir untuk bertransaksi secara tunai, namun tetap perlu berhati-hati dan mengenali ciri-ciri uang asli dengan cara 3D," tegasnya.

Ia juga memastikan, secara rutin, seluruh unsur Botasupal yang terdiri dari BIN, Polri, Kejagung, Kemenkeu, dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan uang palsu sesuai dengan kewenangan masing-masing unsur, serta rangkaian koordinasi untuk menindaklanjuti kasus pemalsuan uang yang terjadi.

Bank Indonesia memastikan bahwa upaya preemptif, preventif, dan represif dalam pemberantasan uang palsu terus berjalan melalui sinergi dengan seluruh unsur Botasupal.

Sebagai bentuk implementasi tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai unsur Botasupal yang diatur dalam Perpres Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu

(Botasupal), serta kewenangan Bank Indonesia dalam menentukan keaslian uang Rupiah sebagaimana UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia senantiasa melakukan berbagai upaya.

Dari sisi preemptif, sejalan dengan best practice internasional, Bank Indonesia terus berupaya memastikan uang Rupiah yang diedarkan berkualitas, aman dan handal melalui standarisasi uang Rupiah, meningkatkan kualitas unsur pengamanan, dan menindaklanjuti hasil analisis Laboratorium Uang Palsu (Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center atau BI-CAC).(din,rls,ant/dya)



Beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan maraknya temuan kasus uang palsu. Bank Indonesia (BI) menepis adanya kenaikan itu.

pidana pemalsuan rupiah.

Anwar pun menekankan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kasus-kasus uang palsu, seluruhnya teridentifikasi berkualitas sangat rendah, yaitu tidak ada unsur pengamanan uang yang berhasil dipalsukan.

Uang palsu juga dicetak menggunakan teknik cetak dan bahan kertas biasa, dan sangat mudah diidentifikasi dengan kasat mata melalui metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang).

"Oleh karena itu, masyarakat tidak

Tentu masih ingat "pabrik" uang palsu di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Terbaru, Sekar Arum Widara, mantan aktris yang melakukan aksi peredaran uang palsu.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia M. Anwar Bashori mengatakan, berbagi temuan itu sebetulnya tidak membuat data keseluruhan peredaran uang palsu di Indonesia mengalami peningkatan.

Ia mengatakan, data temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun seiring dengan meningkatnya kualitas uang (bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengamanan) yang semakin modern dan terkini, di samping terus digalakkannya edukasi cara mengenal ciri keaslian uang Rupiah secara massif dan sinergi erat seluruh unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal.

Sepanjang 2024 rasio uang palsu tercatat sebesar 4 ppm (piece per million atau 4 lembar dalam setiap 1 juta uang yang beredar), menurun dibandingkan 2023 yang tercatat 5 ppm. Adapun pada periode Kuartal I-2025, rasio uang palsu tercatat rendah sebesar 1 ppm.

"Temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun," kata Anwar Bashori kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025)

Adapun temuan-temuan kasus uang palsu yang makin marak beredar informasinya, menurut Anwar sebetulnya bentuk penegakan hukum yang dilakukan Polri terhadap tindak

Kala Uang Palsu Diedarkan di Mal hingga Masjid

UANG palsu yang diedarkan oleh artis kolosal, Sekar Arum Widara, ternyata tak hanya diedarkan di mal tapi juga tempat ibadah yakni masjid. Nominal uang palsu yang diedarkan di masjid mencapai Rp 10 juta.

"Jadi keterangan yang kita dapat setelah kita dalam, bahwa SA (Sekar Arum) sudah mengakui itu uang yang diduga palsu diberikan ke salah satu rumah ibadah," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, pada Rabu (16/4/2024).

Sebagai tindak lanjut, Nurma menambahkan pihaknya bakal meminta keterangan dari pihak masjid. Sejauh ini, belum ada lokasi selain masjid dan mal yang dijadikan tempat mengedarkan uang palsu.

"Iya jelas nanti kita akan meminta keterangan (ke masjid), apakah betul ada yang didapat," ucap dia.

Sebelumnya, Sekar ditangkap oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus peredaran uang palsu, di sebuah toko di Lippo Mal, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/4/2025).

Kasus ini bermula saat Sekar belanja di Lippo Mal, tepatnya di

Az.ko dan Hypermart. Saat Sekar melakukan transaksi di Hypermart, kasir memproses pembayaran dengan uang palsu diduga milik Sekar, lalu transaksi sempat berhasil.

Pada hari yang sama, Sekar mencoba lagi melakukan transaksi pembelian di toko yang sama, namun di kasir yang berbeda.

Kasir toko kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan mesin pendeteksi uang sinar UV. Uang tersebut dinyatakan palsu dan transaksi dibatalkan. Lalu, dengan uang yang sama, Sekar mencoba melakukan pembelian lagi di toko lain yaitu Az.ko.

Saat itu, Sekar memberi 11 lembar uang palsu ke kasir. Setelah dicek, ternyata uang itu lagi-lagi terbukti palsu. Pihak keamanan mal lalu mengamankan Sekar dan memberitahukan kasus ini kepada manajemen mal Lippo Kemang.

Saat diamankan polisi mengamankan uang palsu pecahan Rp 100 ribu dengan total Rp 40 juta. Uang itu disimpan dalam tas Sekar.

Polisi kemudian mendalami kasus ini. Dari hasil pendalaman, dari tangan Sekar disita uang palsu

DERETAN KASUS PEREDARAN UANG PALSU 2 TAHUN TERAKHIR

Sukoharjo, Jawa Tengah

Pada 1 November 2022, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo berhasil membongkar kasus pembuatan dan peredaran uang palsu atau upal dengan nilai mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Produsen upal tersebut terletak di sebuah rumah di Kampung Larangan, Kecamatan Sukoharjo Kota, atau tepatnya di belakang rumah dinas Bupati Sukoharjo.

Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

Mei 2023, Polda Metro Jaya menangkap 12 pelaku penjual uang palsu dolar AS senilai Rp5,855 miliar. Disita 3.922 lembar pecahan 100 USD. Pelaku menjual 1.000 lembar seharga Rp50-100 juta. Penangkapan dilakukan lewat penyamaran polisi saat transaksi di rumah makan.

Kembangan, Jakarta Barat

Pada 15 Juni 2024, Polda Metro Jaya meringkus tiga tersangka yang siap mengedarkan uang palsu senilai Rp 22 miliar. Polda Metro Jaya menyatakan uang palsu senilai Rp22 miliar yang dicetak di sebuah kantor akuntan di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, belum sempat diedarkan ke masyarakat.

Bekasi, Jawa Barat

Bareskrim Polri menangkap 8 orang yang diduga terlibat produksi uang palsu di Bekasi, Jawa Barat. Mereka adalah SUR, SU, IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR. Dari penggerebekan yang dilakukan di wilayah Bekasi, polisi menyita uang palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak 12 ribu lembar.

UIN Alauddin Makassar

Pada 14 Desember 2024, Polres Gowa mengungkap sindikat uang palsu yang melibatkan pegawai UIN Alauddin Makassar. Kapolda Sulsel Irjen Yudhiawan Wibisono menyebut 17 tersangka terlibat, berasal dari berbagai latar pekerjaan.

sebanyak 2.235 lembar pecahan Rp 100 ribu, berarti uang palsu itu sebanyak Rp 223.500.000. Ada pula dua unit handphone iPhone 11 Pro Max dan Xiaomi Redmi.

Sekar ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 26 Ayat 2 dan 3 Jo 36 Ayat 2 dan 3 UU RI No. 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan atau Pasal 244 KUHP dan atau Pasal 245 KUHP.(wid,ist/dya)

Jadi Catatan Dewan, Pemkot Malang Janji Selesaikan Masalah 2 Pasar Tradisional di 2025



MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berkomitmen untuk menyelesaikan dua permasalahan pasar tradisional yang selama bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan penanganan Pasar Blimbing dan Pasar Induk Gadang (PIG) akan menjadi salah satu program prioritas yang diupayakan tuntas pada tahun 2025.

Hal ini disampaikan Wahyu usai menerima laporan dan catatan

evaluasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Meski LKPJ diterima, sejumlah catatan penting mengemuka, salah satunya terkait penyelesaian pasar tradisional.

"Dari catatan itu akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi juga untuk tahun ini. Ini pertanggungjawaban yang harus kami tindaklanjuti," ujar Wahyu, Rabu (16/4/2025).

Wahyu mengakui, selama dirinya

menjabat sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota pada tahun 2023-2024, penyelesaian dua pasar tersebut memang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Namun, ia menegaskan pada tahun 2025, hal itu akan menjadi prioritasnya bersama Wakil Wali Kota.

"Penyelesaian dua pasar, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang ini tidak bisa serta merta. Tapi kami sudah bertemu dengan pihak ketiga. Ada tahapannya, kami sudah beri waktu kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan," terangnya.

Lebih lanjut, Wahyu menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi progres dari pihak ketiga terkait penyelesaian proyek tersebut. Jika tidak ada perkembangan signifikan, Pemkot Malang siap mengambil langkah lain sebagai solusi alternatif.

"Di tahun 2025 ini akan kami tagih seperti apa tindak lanjutnya. Kalau memang tidak ada, kami akan ambil suatu langkah sebagai solusi lain," tegas Wahyu. Secara khusus, Wahyu optimistis penyelesaian Pasar Induk Gadang bisa lebih cepat ketimbang Pasar Blimbing. Kendati demikian, ia menekankan upaya penyelesaian tidak

bisa dilakukan secara sepihak karena ada keterikatan kontraktual dengan pihak ketiga.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita, menambahkan persoalan dua pasar tersebut sudah berlangsung lintas periode pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap besar di tahun 2025, Pemkot Malang benar-benar bisa menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami berharap banyak di 2025 ini ada upaya-upaya untuk bisa menjadi solusi," tambahnya.

Terkait target penyelesaian, Amithya menyatakan pihak legislatif berharap percepatan dapat dilakukan. Minimal, ia ingin pada tahun ini permasalahan yang ada sudah bisa dipersempit dan tinggal menunggu proses administrasi.

"Kalau target pastinya kami maunya cepat, ya. Tahun ini kami berharap bisa terselesaikan. Paling tidak dari keseluruhan permasalahan yang ada, sudah semakin bisa dikerucutkan dan tinggal step-step yang sifatnya mungkin tinggal administrasi saja," pungkasnya. (Santi/Dya)

Program 1.000 Sarjana: Pemkot Batu Siapkan Rp 1,4 Miliar

BATU - Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu akan mulai merealisasikan program 1.000 Sarjana. Salah satu program unggulan dari janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Nurochman dan Heli Suyanto ini, akan digulirkan dengan anggaran awal sebesar Rp1,4 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M. Chori mengatakan, program ini menasar warga Kota Batu, khususnya dari keluarga kurang mampu dan berprestasi, untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi secara gratis.

"Namanya adalah program Beasiswa SAE. Ini akan kami realisasikan tahun ini sesuai visi dan misi kepala daerah untuk mewujudkan SDM yang berkarakter, berkualitas dan berdaya saing," ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Chori menambahkan, dalam pelaksanaan awal ini, Pemkot Batu telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar dari APBD. Dana tersebut berasal dari pagu awal sebesar Rp 400 juta yang kemudian ditambah dari hasil efisiensi sebesar Rp 600 juta.

"Kemudian didukung lagi dari CSR Bank Jatim sebesar Rp 400 juta. Jadi

total anggaran untuk program ini tahun ini mencapai Rp 1,4 miliar," beber Chori.

Demi optimalisasi penyaluran beasiswa, Chori menyebutkan, pihaknya kini tengah menyusun regulasi dan kriteria penerima. Beberapa kelompok sasaran dikatakannya telah mulai dipetakan.

Di antaranya, yakni warga kurang mampu yang bisa dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain jalur afirmasi, juga akan tersedia jalur prestasi.

"Untuk jalur prestasi, minimal harus pernah menjuarai lomba tingkat provinsi, baik di bidang akademik maupun non-akademik," imbuh Chori.

Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman, menyebutkan program ini sejalan dengan visinya dalam menciptakan SDM unggul. Menurutnya, Program 1.000 Sarjana dirancang untuk menjawab ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja di Kota Batu.

"Kami ingin mendorong generasi



muda Kota Batu memiliki akses pendidikan tinggi, agar tidak tertinggal dan bisa bersaing. Namun, kita juga melihat fakta bahwa tidak semua masyarakat mampu secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan tinggi," ujar pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur ini.

Untuk itu, dikatakannya Pemkot Batu tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga menggandeng perusahaan-perusahaan lewat skema tanggung jawab sosial perusahaan atau

Corporate Social Responsibility (CSR).

Lebih lanjut, Cak Nur menjelaskan mekanisme pemanfaatan dana CSR kini masih dalam tahap pembahasan. Pemkot Batu juga tengah mengevaluasi struktur dan personel Forum CSR Kota Batu sebagai pengelola dana sosial tersebut.

"Kami kan sudah punya Perda CSR, forum CSR juga sudah disahkan melalui SK. Namun, sekarang sedang kami evaluasi agar pengelolannya lebih efektif," tutupnya. (Santi/Dya)



Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terlihat bersama pasukan Israel di Jalur Gaza. (GPO/AVI OHAYON)

Kunjungan ini berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel, baik melalui serangan udara maupun darat, di wilayah kantong Palestina tersebut.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengunjungi Jalur Gaza bagian utara pada hari ini," demikian pengumuman yang dirilis kantor PM Israel pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari AFP, Rabu (16/4/2025).

Netanyahu, saat menemui pasukan Israel dalam kunjungannya ke Gaza, menegaskan bahwa Israel akan terus melancarkan serangan militer terhadap Hamas untuk mengamankan pembebasan para sandera yang masih ditahan.

"Mereka menyerang musuh dan Hamas akan terus merasakan pukulan demi pukulan. Kita bersikeras agar mereka membebaskan para sandera kita, dan kita bersikeras untuk mencapai semua tujuan perang kita," kata Netanyahu kepada pasukan Israel di Gaza, menurut pernyataan yang dirilis kantor PM Israel.

Militer Israel melanjutkan serangannya terhadap Gaza pada 18 Maret lalu, yang mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan dengan Hamas, yang sebagian besar telah menghentikan pertempuran di wilayah itu.

Sejak saat itu, pasukan Israel merebut sebagian besar wilayah Jalur Gaza, dengan ratusan ribu penduduk sipil melarikan diri dari area-area yang menjadi target serangan gencar Israel.

Pejabat-pejabat senior Israel, termasuk Netanyahu, telah berulang kali menegaskan bahwa hanya tekanan militer yang akan memaksa Hamas untuk membebaskan para sandera yang tersisa di Gaza.

Baru-baru ini, Israel menawarkan proposal terbaru untuk menghentikan pertempuran di Jalur Gaza, yang memasuki bulan ke-18 sejak Oktober 2023. Hamas mengatakan pihaknya telah menerima proposal tersebut.

Seorang pejabat Hamas yang tidak disebut namanya, mengungkapkan bahwa tawaran terbaru Israel itu mencakup gencatan senjata selama setidaknya 45 hari, jika Hamas membebaskan 10 sandera yang masih ditahan dalam keadaan hidup.

Pertama Kalinya, Netanyahu Masuk Gaza

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan kunjungan yang tidak biasa ke Jalur Gaza pada Selasa (15/4/2025) waktu setempat

Proposal terbaru Israel itu juga mengatur soal pembebasan 1.231 tahanan Palestina dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang diblokade sepenuhnya sejak 2 Maret.

Proposal itu, menurut pejabat Hamas, menyerukan "penghentian perang secara permanen" dengan syarat faksi-faksi Palestina di Gaza, termasuk Hamas, melucuti senjatanya.

Hamas menolak keras tuntutan perlucutan senjata, yang disebut mereka sebagai "garis merah" dan "tidak dapat dinegosiasikan". (AFP, ist/nei)

BEBERAPA NEGARA YANG RESMI AKUI PALESTINA

- China
- Rusia
- Irlandia
- Iran
- Irak
- India
- Bangladesh
- Pakistan
- **Indonesia**
- Swedia
- Norwegia
- Bulgaria
- Turki
- Ukraina
- Belarus
- Afrika Selatan
- Argentina
- Peru
- Bolivia
- Nicaragua
- Mongolia
- Kazakstan
- Romania
- Algeria
- Mali
- Malaysia
- Thailand
- Kamboja
- Brasil
- Pantai Gading
- Kenya
- Tanzania
- Nigeria
- Kongo
- Gabon
- Spanyol
- Laos
- Vietnam
- Filipina

Tanggapan Keras untuk Marcon yang Berniat Akui Palestina

PM Israel Netanyahu menyampaikan kepada Presiden Macron bahwa pembentukan negara Palestina akan menjadi 'hadiah besar bagi terorisme', menanggapi rencana Prancis untuk mengakuinya.

Macron, dalam pernyataan terbaru, dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Rabu (16/4/2025), mengatakan dirinya menegaskan kepada Netanyahu bahwa penderitaan warga sipil di Jalur Gaza "harus diakhiri".

Macron juga mengatakan kepada Netanyahu, bahwa hanya gencatan senjata dalam perang melawan Hamas yang akan membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Pernyataan yang dirilis kantor PM Israel menyebutkan kedua pemimpin berbicara via telepon pada Selasa (15/4/2025) waktu setempat. Dalam percakapan itu, Netanyahu menyampaikan kepada Macron soal "sikapnya yang menentang keras pembentukan negara Palestina, dengan menyatakan hal bahwa itu akan menjadi hadiah besar bagi terorisme".

"Perdana Menteri mengatakan kepada Presiden Prancis bahwa negara Palestina yang didirikan hanya beberapa menit dari kota-kota Israel akan menjadi benteng terorisme Iran, dan bahwa sebagian

besar masyarakat Israel dengan tegas menentang hal ini dan hal ini telah menjadi kebijakannya yang konsisten dan sudah berlangsung sejak lama," jelas kantor PM Israel dalam pernyataannya.

Sementara itu, Macron secara terpisah mengatakan dirinya telah menyampaikan kepada Netanyahu bahwa "cobaan berat yang dialami penduduk sipil Gaza harus diakhiri". Macron juga "menyerukan pembukaan semua perlintasan perbatasan untuk masuknya bantuan kemanusiaan" ke Jalur Gaza.

Israel memutuskan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sejak 2 Maret lalu untuk menekan Hamas.

Seruan itu disampaikan setelah komentar Macron pekan lalu yang menyebut Prancis dapat mengakui negara Palestina dalam beberapa bulan ke depan. Komentar itu menuai gelombang kecaman di Israel, termasuk dari Netanyahu dan putranya, serta dikritik kelompok sayap kanan di Prancis.

Macron, pada Senin (14/4/2025), mengungkapkan harapannya agar pengakuan yang diberikan Prancis terhadap negara Palestina akan mendorong negara-negara lainnya untuk mengikuti, dan agar negara-negara yang tidak mengakui Israel akhirnya bersedia memberikan pengakuan serupa.



Sehari sebelum teleponan dengan Netanyahu, Macron berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, di mana dia menyatakan dukungan untuk rencana Otoritas Palestina memerintah Gaza pascaperang, jika mengalami reformasi.

"Sangat penting untuk menetapkan kerangka kerja untuk hari-hari setelah perang: melucuti senjata dan menyingkirkan Hamas, menetapkan pemerintahan yang kredibel, dan mereformasi Otoritas Palestina," cetus Macron kepada Abbas. (AFP, Al Arabiya, ist/nei)

Mama Gina Kimbab Family Ungkap Rahasia Keluarga Harmonis

Mewujudkan keluarga yang harmonis adalah impian setiap pasangan yang memilih untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selama menjalani kehidupan bersama, dibutuhkan saling pengertian, komunikasi yang efektif, dan komitmen untuk saling mendukung.

Kimbab Family dikenal sebagai keluarga Indonesia-Korea yang harmonis dan aktif di YouTube. Kehidupan mereka sebagai keluarga multikultural di Korea telah memberikan inspirasi bagi banyak orang, mulai dari generasi muda hingga orang tua, khususnya di Indonesia, lewat berbagai momen keseharian yang mereka bagikan.

Mari kita kenali lebih dekat Gina Selvina, yang akrab dipanggil Mama Gina dari Kimbab Family. Ia bersedia berbagi cerita mengenai seorang ibu dari tiga anak di Korea Selatan.

Dari video berdurasi lima menit yang diunggah di media sosial, Mama Gina, yang merupakan Exclusive Talent Gushcloud, dengan penuh semangat menceritakan pengalaman membesarkan anak-anak yang berasal dari berbagai budaya. Dia menekankan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga serta memberikan tips untuk menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sebagai ibu rumah tangga.

"Karena gap umurnya enggak jauh beda, jadi semua harus adil," kata Mama Gina dikutip Rabu (16/4/2025).

Suka Duka Jadi Ibu 3 Anak

Memiliki tiga anak dengan rentang usia yang dekat di negara asing tentunya bukan hal yang mudah. Namun bagi Mama Gina, kunci untuk menerima sebagai ibu adalah dengan memberi isyarat yang adil kepada semua anaknya. Dia juga membagikan tips berharga bagi para ibu yang memiliki banyak anak, seperti memilih pakaian anak dengan warna netral agar dapat digunakan secara bergantian.

"Ini tips hemat, kalau beli baju pilih warna netral biar bisa dipakai adiknya," ungkap Mama Gina sambil tersenyum.

Komunikasi Jadi Kunci Keluarga Harmonis

Tinggal di Korea bersama suami dan anak-anak, Mama Gina menekankan komunikasi terbuka dalam keluarga sangatlah penting, terutama dengan pasangan. "Kadang-kadang suami enggak tahu apa yang kita pikirin, jadi kita harus ngomong. Terbuka, supaya ke depannya suami udah tahu saya maunya apa," ungkap Mama Gina.

Menurutnya, komunikasi yang baik juga diperlukan dalam pembagian peran di rumah. Ia berpendapat bahwa tidak ada pembagian tugas yang kaku antara dirinya dan suaminya. Mereka saling membantu dalam mengurus anak dan mengurus rumah tangga.

"Kalau peran khusus sebenarnya tidak

ada, semuanya di bagi. Appa Jay juga kadang bantu ngerjain PR anak, nyiapin sarapan juga. Jadi yang di bagian paling memperkenalkan budaya masing-masing, selain itu semuanya sama-sama," jelas Mama Gina. Selain itu, Mama Gina juga menanamkan nilai penting tentang saling menghargai kepada anak-anak mereka. "Menghargai satu sama lain. Jadi orang tua ke anak dan anak ke orang tua. Saling menghormati." tegasnya.

Dalam keluarga multikultur ini, mereka mengenalkan budaya masing-masing, termasuk kebiasaan sehari-hari yang mungkin berbeda, seperti penggunaan tangan kiri di Korea dan Indonesia. Di Indonesia, penggunaan tangan kiri bisa dianggap tidak sopan, sedangkan di Korea tidak demikian.

Tetap Jaga Kesehatan Mental

Di tengah kesibukannya merawat tiga anak dan mengurus rumah, Mama Gina juga menekankan pentingnya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, ia tidak segan mengungkapkan perasaannya kepada suami. "Karena di rumah hanya ada saya, akang, dan anak-anak, kalau lagi kecapekan, saya bilang ke suami 'Akang, saya hari ini mau off bersih-bersih,'" ungkap Mama Gina.

Dengan anak-anak yang kini sudah mulai bersekolah, Mama Gina memanfaatkan waktu yang ada untuk me time, seperti berolahraga dan menikmati waktu mandi yang panjang

dan menenangkan. "Kegiatan yang saya suka lakukan adalah mandi yang lama dan olahraga," kata Mama Gina. Selain itu, Mama Gina juga memperhatikan kualitas tidurnya untuk mengatur emosi dan tetap tenang dalam menghadapi anak-anak.

"Tidur yang cukup itu penting banget. Kalau kita kurang tidur, suka tantrum dan bisa mempengaruhi anak-anak," tambahnya.

Melalui pengalaman yang dimilikinya, Mama Gina menunjukkan keharmonisan dalam keluarga dapat dibangun melalui komunikasi yang baik, kerja sama, dan saling menghargai. Meski berada jauh dari tanah air, ia berhasil menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan kedekatan bersama suami dan anak-anak.

Pentingnya Membangun Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis tidak hanya menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga, tetapi juga membangun lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan diperhatikan. Salah satu tips utama dalam membangun keluarga harmonis adalah komunikasi yang efektif.

Berbicara terbuka dan jujur, serta mendengarkan dengan penuh perhatian, dapat mengurangi konflik dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di antara anggota keluarga. Selain itu, saling menghormati perbedaan, bekerja sama dalam mengatasi masalah, dan menciptakan momen bersama-sama juga merupakan langkah-langkah penting (nei,ist/dya)



Meta Latih AI Gunakan Data Publik

Meta berencana melatih model kecerdasan buaatannya (AI) dengan memanfaatkan data publik dari pengguna di Eropa, termasuk konten yang dibagikan secara terbuka dan interaksi mereka dengan chatbot AI.

Dikutip dari France24, Rabu (16/4/2025), keputusan ini merupakan perubahan haluan besar dari Meta sebagai pemilik Facebook dan Instagram. Sebelumnya, Meta mewaspadai aturan ketat tentang privasi data yang berlaku di Uni Eropa, mengenai penggunaan data pribadi.

Sekadar informasi, Meta menekankan, pengguna di Uni Eropa yang menggunakan platform Meta bisa memilih untuk tidak mengizinkan data mereka dipakai guna pelatihan AI generatif.

Dengan pernyataan Meta yang akan memakai data dan konten publik dari platformnya, itu artinya mulai dari caption foto Instagram hingga komentar Facebook akan diincar Meta untuk melatih Meta AI.

Pelatihan masif dengan data publik pengguna Eropa ini salah satunya ditujukan agar perusahaan yang didirikan Mark Zuckerberg itu bisa menyaingi AI yang kini memimpin pasar, ChatGPT.

"Pelatihan ini akan lebih mendukung jutaan orang dan bisnis di Eropa, untuk melatih model AI generatif kami guna lebih memahami dan mencerminkan budaya, bahasa, dan sejarah mereka," kata Meta dalam pernyataan belum lama ini.

Adapun WhatsApp Messenger untuk sementara waktu tidak akan terpengaruh dengan perubahan ini.

Meta menekankan, perubahan ini tidak akan berlaku pada akun pengguna yang berusia di bawah 18 tahun atau pesan pribadi yang

dikirimkan pengguna kepada keluarga atau teman.

Mengenai formulir opsi persetujuan, Meta menyebut, pihaknya telah membuat form ini mudah ditemukan, dibaca dan digunakan. Perusahaan juga menyebut, pihaknya akan menghargai semua keberatan yang diajukan maupun yang akan diajukan.

Kritik Terhadap AI

Meski AI memiliki potensi besar, kritikus terus mempersoalkan tentang etika yang melekat di dalamnya, kemampuan untuk menimbulkan sifat destruktif, dan potensi kontribusi teknologi yang menghabiskan banyak energi dan pengaruhnya bagi perubahan iklim.

Meta sendiri memperkenalkan Meta AI untuk pengguna di Uni Eropa pada akhir Maret lalu. Raksasa teknologi Amerika Serikat ini bersusah payah menunjukkan bahwa chatbot Meta AI tidak dilatih berdasarkan data dari pengguna Eropa.

Peluncurannya di Eropa pun saat itu tertunda lebih dari setahun karena regulasi di Eropa mengenai teknologi baru, termasuk berkaitan dengan data pengguna, AI, dan pasar digital.

Meta menegaskan dalam pengumumannya, data tersebut tidaklah unik di Eropa. Alasannya mengikuti contoh yang ditetapkan oleh Google dan OpenAI, pembesut ChatGPT.

Meta AI diperkenalkan di pasar Amerika Serikat pada September 2023, kemudian baru diluncurkan di seluruh aplikasi grup Meta pada April 2024.

Meski pembuatan gambar berbasis AI tersedia di AS, di Uni Eropa, AI generatif bisa membuat respons tekstual terhadap pertanyaan

pengguna.

Tidak hanya itu, Meta AI juga bisa memanfaatkan pencarian web untuk mendapatkan jawabannya.

Aturan Ketat Uni Eropa

Pengembangan LLM seperti Meta AI memerlukan cadangan data yang besar dan diatur ketat di Uni Eropa, apalagi terkait dengan pengguna individu.

Seperti halnya perusahaan teknologi lainnya, AI merupakan prioritas utama bagi Meta saat ini.

Meta juga berencana menambah investasi lebih besar antara USD 60-65 miliar di 2025. Sebagian dananya akan dikerahkan untuk data center, server, dan infrastruktur jaringan yang diperlukan untuk mengembangkan model AI.

Meta mengklaim, saat ini Meta AI dipakai oleh 700 juta pengguna aktif bulanan. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah hingga 1 miliar pengguna oleh Mark Zuckerberg, demi tujuan keuntungan jangka panjang perusahaan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Inspirasi Kebaya Anggun untuk Hari Kartini

Hari Kartini tahun 2025 diperingati pada Senin, 21 April. Sebagai bentuk penghormatan terhadap momen bersejarah ini, para perempuan dapat mengenakannya dengan kebaya sebagai simbol penghargaan.

Kebaya menjadi busana sehari-hari perempuan Indonesia pada zaman dahulu, termasuk R.A Kartini. Sayangnya, di masa kini, kebaya mulai tergantikan dengan pakaian modern yang memiliki beraneka model.

Kebaya adalah pakaian tradisional Indonesia yang elegan, memiliki banyak makna dan filosofi yang melengkapinya. Selain menjadi simbol keindahan dan identitas bangsa Indonesia, kebaya juga mewakili nilai-nilai budaya yang kaya dan mengandung pesan-pesan penting yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebaya menjadi salah satu simbol kebanggaan nasional karena merupakan pakaian tradisional yang khas Indonesia. Ketika mengenakan kebaya, kita secara tidak langsung memperlihatkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya dan warisan nenek moyang kita.

Di balik keindahannya, kebaya juga memiliki makna spiritual dan simbolik yang mendalam. Banyak kebaya tradisional terbuat dari bahan-bahan alami dan dihiasi dengan motif-motif simbolik yang memiliki makna tersendiri.

Misalnya, motif bunga dalam kebaya menggambarkan kemakmuran dan kehidupan yang berlimpah, sementara motif burung melambangkan kebebasan dan keindahan alam. Selain itu, setiap elemen dalam

kebaya, seperti kerah dan kancing, juga memiliki arti filosofis yang melambangkan keberanian, kesetiaan, dan keindahan. Untuk menghidupkan dan mengenang sejarah perjuangan R.A Kartini dalam menyetarakan pendidikan, yuk kenakan kebaya di Hari Kartini nanti. Sebagai referensi, kamu bisa simak ide kebaya untuk Hari Kartini di bawah ini.

Ide Kebaya untuk Hari Kartini

Merujuk pada buku Pesona Kebaya & Batik: Busana Nasional Wanita Indonesia nan Cantik & Anggun susunan Adi Kusrianto, ada beberapa jenis kebaya yang cocok dikenakan saat Hari Kartini. Apa saja?

Kebaya Jawa

Kebaya Jawa sering juga kebaya Kartini karena R.A. Kartini kerap berfoto mengenakan jenis kebaya ini. Ciri khasnya kebaya Jawa adalah modelnya yang lebih formal dengan sedikit ornamen atau hiasan.

Kalaupun menggunakan ornamen, biasanya hanya berupa bordiran yang diletakkan di bagian pinggir busana. Potongan kerahnya berbentuk "V" yang membuat leher pemakainya terkesan lebih jenjang. Panjang kebaya ini menutupi pinggul sehingga aman dipakai oleh pengguna hijab.

Kebaya Encim

Kebaya encim merupakan hasil modifikasi para perempuan Tionghoa Peranakan di Jawa pada masa kolonial Belanda. Awalnya, mereka meniru kebaya Indonesia, tapi menggunakan kain putih mahal yang dihias renda renda hasil impor dari Eropa.

Kemudian, mereka membuat kebaya kerancang yang masih sangat mirip dengan kebaya Indo. Bedanya, renda diganti kerancang atau cutwork, yaitu kain dengan efek berlubang yang dihasilkan dengan proses bordir mesin jahit.

Dari situlah kebaya encim akhirnya lahir dan menyebar di masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebaya ini tak lagi hanya untuk perempuan Tionghoa, tapi juga seluruh perempuan Indonesia.

Kebaya Kutubaru

Kebaya kutubaru memiliki bentuk yang khas dengan lapisan tengah berbentuk segi empat di bagian depan kebaya. Biasanya, kebaya ini dipadukan korset, longtorso, atau kamsol, agar area depan lebih tertutup.

Bentuk kerah kebaya kutubaru memang cukup rendah, sehingga bagian dada mungkin akan terekspos jika tidak dipadukan dengan dalaman. Namun, sudah banyak kebaya kutubaru modern yang dimodifikasi dengan dalaman agar area depan tubuh lebih tertutup.

Kebaya Sunda

Kebaya Sunda terkenal menggunakan kain brokat yang didesain ketat. Jenis ini sering diterapkan pada kebaya modern dan kebaya pernikahan di Indonesia. Kainnya menggunakan bahan semi transparan dengan motif bunga atau hiasan bordir. Perbedaan utama kebaya ini dengan kebaya lainnya adalah model kerahnya yang "U". Selain itu, bagian bawah kebaya ini sangat panjang hingga menutupi paha.

Kebaya Bali

Kebaya Bali memiliki bentuk leher "V" yang kadang mendekati bentuk "U" dengan kerah dilipat. Kemudian, kadang-kadang bagian kerah diberi hiasan tali pengikat.

Kebaya Bali biasanya didesain ketat di badan, dengan bahan semi transparan dari kain katun atau brokat. Di bagian depan kebaya biasanya ditambahkan kancing, lalu disempurnakan dengan sabuk kebaya seperti obi untuk membungkus pinggang.

Kebaya Labuh

Kebaya yang berasal dari Kepulauan Riau ini juga salah satu kebaya yang cantik dengan panjang hingga ke bawah lutut. Baju ini juga bisa dibilang serupa dengan baju kurung khas Melayu.

Namun, kebaya ini bagian bawahnya terkesan lebih lebar dan terbuka. Hal tersebut membuat kebaya ini seakan memberikan siluet tubuh yang indah kepada penggunanya. (nei,ist/dya)



Tak Dibayar (dari Hal 1)

Salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025. Dapur tersebut dikelola oleh Ira Mesra, mitra dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berhentinya dapur MBG Kalibata tersebut karena sudah tidak mampu menjalankan operasional. Pasalnya, biaya operasional sebesar Rp975.375.000 tidak kunjung dibayarkan oleh Yayasan MBN. Atas hal ini, pihak Ira selaku pengelola dapur MBG Kalibata melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, sejak awal Februari 2025, dapur MBG Kalibata mulai beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi dalam program nasional yang berada di bawah naungan BGN. Dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira ditunjuk sebagai mitra oleh Yayasan MBN dalam menyiapkan makanan program MBG.

Dalam kurun waktu dua bulan, dapur yang dikelola oleh Ira telah memasak dan menyalurkan 65.025 porsi makanan dalam dua tahap kegiatan. Tapi, hingga akhir operasionalnya pada Maret 2025, Ira tidak menerima pembayaran satu rupiah pun dari pihak yayasan untuk menutupi biaya operasional.

"Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60.000 porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun," kata Harly.

Masalah mulai mencuat pada Senin, (24/3/2025), ketika pihak Ira mengetahui adanya perubahan nilai anggaran per porsi makanan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. "Perselisihan ini terjadi pada Senin, (24/3/2025), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," kata Harly.

Dalam kontrak, disebutkan bahwa harga makanan adalah Rp15.000 per porsi untuk semua porsi makanan. Namun, di tengah pelaksanaan, sebagian harga diubah secara oleh yayasan MBN menjadi Rp13.000 per porsi. Tak hanya itu, dari kedua nilai tersebut, hak Ira masih dipotong lagi sebesar Rp2.500 per porsi, sehingga nilai aktual yang diterima dapur MBG Kalibata hanya Rp12.500, bahkan Rp10.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," ungkap Harly.

Alih-alih membayarkan uang operasional produksi, pihak Yayasan MBN justru menyebut, bahwa Ira masih memiliki tunggakan sebesar



Kondisi mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Kalibata. Ist

Rp45.314.249. Angka ini disebut berasal dari invoice pembelian barang oleh yayasan atau SPPG di lapangan.

Namun, klaim ini dibantah keras oleh pihak Ira. Menurut Harly, semua pembelian dan pengadaan barang dilakukan langsung oleh Ira tanpa bantuan dari yayasan, termasuk seluruh kegiatan operasional dapur ditanggung sendiri oleh Ira.

Diantaranya, seperti bahan pangan, sewa tempat, kendaraan operasional, listrik, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dibayar oleh pihak dapur tanpa dukungan dana dari yayasan. "Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira," tegas Harly.

Sementara itu, Harly mengungkapkan, bahwa Yayasan MBN telah menerima pencairan dana sebesar Rp386.500.000 dari BGN, namun dana tersebut tidak diteruskan kepada Ira.

Pasal Penipuan

Karena tidak kunjung menerima

pembayaran dan upaya penagihan tidak membuahkan hasil, pihak Ira akhirnya melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/ Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 April 2025. Yayasan MBN dituduh melakukan penggelapan dana operasional dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp975.375.000.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik terhadap pengelolaan dana sosial, khususnya dalam program-program bantuan makanan yang menasar kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar. Harly berharap agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini.

Dadan: Internal, Jangan Bawa-bawa BGN

BADAN Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi

Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra dapur MBG bernama Ira Mesra didampingi oleh kuasa hukumnya, Danna Harly Putra,

"Yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini," tegas Harly.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah menerima laporan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap pihak Yayasan Makan Bergizi Gratis terkait dugaan penggelapan dana hampir Rp 1 miliar. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut.

"Betul, jadi sudah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan untuk yang makan gratis. Dan itu sudah yang kerja sama antara pihak kedua dan ketiga. Nah, itu yang terjadi. Namun demikian, pasti kita dalam," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kopol Nurma Dewi kepada wartawan di kantornya, Rabu (16/4/2025).

Untuk sementara ini, pihak kepolisian belum menjadwalkan pemanggilan. Dalam laporannya, pelapor menyertakan barang bukti berupa kuitansi.

"Kuitansi kerja sama (barang buktinya), ada kerja sama antara kedua belah pihak yang diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kuitansi senilai Rp 900 juta lebih kita terima untuk sementara ini," tuturnya. (wid, rls, ist, ant/dya)

melakukan mediasi dengan yayasan berinisial MBN bersama Kepala BGN Dadan Hindayana. Ira menggugat MBN karena menunggak pembayaran makanan MBG dengan total hampir Rp 1 miliar sejak Februari 2025.

"Tadi kami sudah bicara panjang lebar dengan Pak Dadan, Alhamdulillah ditemukan solusi yang cukup baik. Jadi mulai besok pun dapur di Kalibata sudah mulai beroperasi kembali. Jadi sudah clear, nanti masalah sisa pembayaran itu memang kami akan tempuh jalur hukum sendiri," kata Danna saat ditemui di kantor BGN di Jakarta Selatan Rabu (16/4/2025).

Danna mengatakan pembiayaan kepada kliennya akan dibantu oleh BGN ditambah modal pribadi. Namun, pihak Ira masih menunggu mekanisme dari BGN. "Tapi yang jelas, kami sudah komitmen. Sudah tadi sudah bisa untuk melanjutkan. Ibu Ira nanti modal lagi. Untuk sistemnya semua sudah dijelaskan tadi, sudah jelas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut," kata Danna. (wid, rls, ant, ist/dya)

Ketegangan Memuncak!

Trump Naikkan Tarif Impor China Jadi 245%

Dalam babak terbaru perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang secara drastis meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok hingga 245 persen.



Di dalam negeri Presiden Donald Trump banjir protes. Terbaru dari Universitas Harvard yang menolak permintaan Trump hingga hibah senilai USD 2,2 miliar (setara Rp 37 triliun) dan USD 60 juta (setara Rp 1 triliun) dalam bentuk kontrak dihentikan. Ist

Mediator Mesir dan Qatar dilaporkan telah menyampaikan proposal baru Israel untuk gencatan senjata Gaza kepada Hamas. Namun, pejabat senior Hamas mengatakan setidaknya dua poin dari proposal tersebut tidak dapat diterima.

Al Qahera News TV yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir melaporkan, kedua mediator tengah menunggu respons dari Hamas.

Melansir Reuters, Selasa (15/4/2025), dalam pernyataannya pada Senin (14/4/2025) waktu setempat, Hamas mengatakan mereka sedang mempelajari proposal tersebut dan akan memberikan tanggapannya "sesegera mungkin."

Kelompok Palestina tersebut menegaskan kembali tuntutan utamanya bahwa kesepakatan gencatan senjata harus mengakhiri perang di Gaza dan menarik keseluruhan tentara Israel dari wilayah tersebut.

Sebelumnya, pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan kepada Reuters bahwa proposal tersebut tidak memenuhi tuntutan kelompoknya agar Israel berkomitmen menghentikan perang sepenuhnya.

Dalam proposal tersebut, Abu Zuhri bilang, Israel juga untuk pertama kalinya mendesak adanya pelucutan senjata Hamas dalam tahap negosiasi selanjutnya, yang tidak akan disetujui kelompok tersebut.

"Menyerahkan senjata perlawanan adalah sejuta garis merah dan tidak bisa pertimbangan, apalagi didiskusikan," kata Abu Zuhri.

Israel belum mengomentari proposal yang dilaporkan tersebut. Kepala layanan informasi negara Mesir mengatakan kepada Al Qahera: "Hamas tahu betul nilai waktu saat ini dan saya yakin bahwa tanggapannya terhadap proposal Israel akan cepat."

Israel memulai kembali

serangannya di daerah kantong tersebut pada Maret, mengakhiri gencatan senjata yang mulai berlaku pada akhir Januari.

Narasumber Palestina dan Mesir menyebut pembicaraan terakhir pada Senin di Kairo untuk memulihkan gencatan senjata dan membebaskan sandera Israel berakhir tanpa proses yang jelas.

Hamas bersikeras Israel harus berkomitmen akan mengakhiri perang dan menarik pasukannya dari Jalur

Gaza, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang mulai berlaku pada akhir Januari lalu.

Israel mengatakan tidak akan mengakhiri perang, kecuali Hamas disingkirkan dan para sandera yang masih ditahan di Gaza dikembalikan.

"Hamas siap menyerahkan para sandera sekaligus dengan imbalan berakhirnya perang dan penarikan militer Israel dari Gaza," beber Abu Zuhri.

Otoritas Kesehatan Gaza

mengungkapkan, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 1.500 warga Palestina sejak memulai kembali serangan militernya bulan lalu.

Israel telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi dan memberlakukan blokade terhadap semua pasokan yang masuk ke daerah kantong tersebut.

Sementara itu, 59 sandera Israel masih ditahan Hamas di Gaza. Israel meyakini 24 dari mereka masih hidup.

Sebelumnya, PBB memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza semakin tak terkendali karena tidak ada bantuan yang masuk ke wilayah tersebut selama berminggu-minggu dan kondisinya memburuk dengan cepat. (wid, reuters, ist/dya)

Rincian Eskalasi Tarif hingga 245 Persen

- Tiongkok akan menghadapi tarif hingga 245% untuk produk tertentu, sebagai balasan atas tindakan balasan mereka terhadap tarif AS sebelumnya.
- Tarif aluminium akan dinaikkan kembali menjadi 25%, menghapus berbagai celah dan pengecualian yang sebelumnya ada.
- Tarif baja juga akan direstorasi ke level asli 25%, untuk "melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak adil."

Kebijakan "Adil dan Resiprokal" dalam Perdagangan Global

- Trump juga meluncurkan inisiatif bernama "Fair and Reciprocal Plan", yang bertujuan mengakhiri kesenjangan dalam kesepakatan dagang non-resiprokal. Perintah tersebut mempertegas bahwa:
- Lebih dari 75 negara telah menghubungi Departemen Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Kantor Perwakilan Dagang AS untuk menegosiasikan perjanjian baru.
- Tarif terhadap negara-negara selain Tiongkok saat ini ditangguhkan sementara guna membuka ruang dialog, tetapi tarif terhadap Tiongkok tetap berlaku tanpa pengecualian.

'Berhenti Mengancam & Memeras!'

MENTERI Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan (BG), mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan menteri untuk membahas rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia. BG mengungkapkan akan ada rapat khusus terkait hal tersebut.

Hal ini terjadi di tengah pengumuman terbaru bahwa produk-produk China kini menghadapi tarif masuk hingga 245% di pasar Amerika Serikat.

Dalam pernyataan keras pada Rabu (16/4/2025), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan bahwa jika Washington serius ingin menyelesaikan konflik ini lewat dialog, maka pendekatan koersif harus dihentikan.

"Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, maka mereka harus menghentikan tekanan ekstrem, berhenti mengancam dan memeras, dan berbicara dengan China berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan," ujar Lin, dilansir AFP.

Lin menambahkan bahwa sikap China tetap konsisten, bahwa tidak ada pemenang dalam perang tarif, namun Negeri Tirai Bambu tidak gentar menghadapi tantangan.

"Posisi China sangat jelas. Tidak ada pihak yang menang dalam perang tarif atau perang dagang. China tidak ingin bertarung, tetapi tidak takut bertarung," tegasnya.

Pernyataan itu keluar beberapa hari setelah Trump menaikkan tarif menjadi total 145% terhadap berbagai produk China, melanjutkan kebijakan sebelumnya yang menambahkan 125% atas dasar praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, serta 20% sebagai respons atas dugaan keterlibatan China dalam rantai pasok fentanyl.

Namun, Gedung Putih telah memberikan kelonggaran sementara untuk beberapa produk teknologi tinggi seperti ponsel pintar, laptop, dan semikonduktor, dengan alasan kebutuhan industri domestik.

Diketahui, China memboikot pabrikan pesawat AS Boeing menyusul perang tarif yang dikobarkan Presiden AS Donald Trump. Negeri Paman Sam mematok

tarif 145 persen untuk semua produk China yang masuk ke negaranya, bahkan kini dinaikkan menjadi 245 persen.

Tiongkok membalas dengan memerintahkan maskapai penerbangannya untuk tak lagi menerima pengiriman pesawat jet dari Boeing. Padahal, tiga maskapai penerbangan terbesar China dijadwalkan menerima pengiriman masing-masing puluhan pesawat pada 2025 sampai 2027. (wud, ist, rls/dya)